

## **BAB II**

### **TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Pada tahun 2015 Pungky Siswiyanti melakukan penelitian yang berjudul pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening dengan metode kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan PAD, DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hasil analisis juga menunjukkan bahwa belanja modal dapat digunakan sebagai variabel intervening (mediasi) hubungan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Murbanto Sinaga, Rika Suriyanto Zalukhu, Daniel Collyn dan Rapat Piter Sony Hutauruk pada tahun 2023 dengan judul pengaruh PAD, dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dikepuluan Nias dengan belanja modal sebagai mediasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana Perimbangan dan efisiensi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan dan efisiensi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PAD dan belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika Widyasari, Novi Dirgantari, Dr. Sri Wahyuni dan Hardiyanto Wibowo pada tahun 2023 berjudul faktor-faktor determinant pertumbuhan ekonomi regional pada masa pandemi di

jawa tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder dan regresi linier berganda sebagai teknik analisis datanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan sampel sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, belanja modal dan SiLPA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suci Nurlita, Hamdani Arifulsyah dan Yefni pada tahun 2018 dengan judul analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. Analisis data dilakukan dengan metode analisis jalur. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio efisiensi, terdapat pengaruh yang signifikan antar rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau melalui variabel pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio efektivitas, terdapat pengaruh yang signifikan antar rasio efektivitas terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

Tahun 2020 Idaman Pinem, Fadhila dan Yois melakukan penelitian yang berjudul pengaruh PAD, DAK, dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai pemoderasi di Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2017. Penelitian ini menunjukkan PAD secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel DAK dan SiLPA secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu memoderasi PAD dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal mampu memoderasi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian selanjutnya oleh H Izudin et al., (2013) yang berjudul kinerja keuangan daerah dan hubungan dengan SiLPA di kabupaten Bungo menggunakan data primer 2001-2020. Metode analisis data yaitu metode deskriptif dan analisa korelasi Karl Pearson's. Penelitian ini menghasilkan hubungan PAD terhadap SiLPA berada pada kategori rendah, komponen hubungan SiLPA dengan SiLPA berada pada kategori sedang, kuat dan sangat kuat, hasil selanjutnya efektifitas berada pada kategori sangat efektif dan efisiensi berada pada kategori tidak, kurang, cukup efisien.

Muhammad Fajar Sulrhoni et al., (2023) melakukan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di kabupaten/kota se-Jawa tahun 2018-2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana

alokasi khusus, belanja modal dan bantuan keuangan mempengaruhi SiLPA, sementara DAU dan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi SiLPA.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustiani (2020) yang berjudul determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2018 melalui pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan secara parsial variabel realisasi dana bagi hasil tidak signifikan terhadap SILPA, dana alokasi umum signifikan terhadap SILPA dan dana alokasi khusus tidak signifikan terhadap SILPA.

Pada penelitian terdahulu belanja modal sering digunakan sebagai variabel mediasi. Belanja modal seringkali sulit diukur secara tepat. Belanja modal sering dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar global, tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, ketika menggunakan belanja modal sebagai variabel mediasi, sulit untuk memastikan bahwa efek yang diamati adalah akibat langsung dari variabel independen misalnya dana perimbangan. Meskipun ada korelasi antara dana perimbangan dan belanja modal, ini tidak selalu berarti bahwa dana perimbangan menyebabkan peningkatan belanja modal atau sebaliknya. Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Lokasi penelitian dan variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel SiLPA sebagai variabel mediasi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian.

## **B. Teori dan Tinjauan Pustaka**

### **Teori Pertumbuhan Endogen**

Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth) atau, secara lebih ringkas, Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory). Menurut teori pertumbuhan endogen, faktor pertumbuhan pada dasarnya adalah perluasan jumlah modal secara keseluruhan (Todaro and Smith, 2006). Bentuk modal investasi yang dapat diterima mencakup segala bentuk atau kategori investasi baru pada tanah, aset fisik, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, modal tidak terbatas pada aset fisik tetapi juga mencakup aset non-fisik seperti pengetahuan dan teknologi.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian pertumbuhan ekonomi regional adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan per kapita yang bersumber dari pendapatan, belanja dan sektor produktif berupa barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan daerah dalam jumlah kecil maupun besar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan (Yasin, 2019). Oleh karena itu, jika pendapatan masyarakat meningkat setiap tahunnya, maka dapat dikatakan perekonomian negara atau daerah tersebut mengalami pertumbuhan. Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel (Diastrina, 2021).

## **Pendapatan asli daerah atau PAD**

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, mengungkapkan bahwa PAD bersumber dari: retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pada sumber lain-lain PAD yang sah juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: pendapatan bunga, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, komisi serta pemotongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah dan jasa giro serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menjumlahkan seluruh sumber-sumber PAD yang telah diuraikan diatas.

## **Dana Perimbangan**

Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah merupakan pengertian dari dana perimbangan. Dana perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah.

Dana perimbangan dipisahkan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

### **1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak**

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- Pajak Penghasilan (PP) Pasal 25 dari Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

4. Dana Perimbangan Provinsi

### **Konsep Efisiensi**

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintahan daerah. Tindakan ini dimaksudkan untuk menghasilkan sejumlah pendapatan tertentu dan penggunaannya untuk alasan ekonomi akan di minimalkan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi yang dicapai akan semakin tinggi jika biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan ditekan serendah mungkin sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, jadi efisiensi berarti upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan biaya sesedikit mungkin atau kemampuan untuk menghasilkan output semaksimal mungkin dari sejumlah input tertentu. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui efisiensi pengelolaan keuangan dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi biaya untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan.

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi itu sendiri merupakan ukuran apakah penggunaan barang atau jasa yang dibeli dan dan digunakan

oleh organisasi pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu yakni pendapatan bagi pemerintah tertentu. Untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat menggunakan rumus rasio efisiensi

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA**

Definisi SiLPA menurut peraturan perundang-undangan no. 58 tahun 2005 adalah pengurangan dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama kurun waktu satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal menjadi kriteria penting ketika pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Aditiya et al, 2017). Selain itu, pemerintah daerah juga menggunakan anggaran SiLPA untuk melaksanakan kegiatan yang belum selesai pada periode sebelumnya atau untuk mendanai kegiatan baru yang tidak di anggaran dalam APBD (Todorova, 2019).

### **C. Perumusan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan mendukung.

#### **1. Hubungan antara PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh daerah secara mandiri sesuai dengan potensi. PAD mendorong pertumbuhan ekonomi karena PAD berperan



sebagai salah satu unsur fiskal pemerintah daerah dengan cara pemerataan pembangunan daerah dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat setempat sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi dan konsumsi yang dapat meningkatkan produk domestik regional bruto.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priambodo,2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan demikian Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palguno et al, (2020) jika variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah (PAD) sangat membantu dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi saat ini, pada era pandemi komposisi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pajak cenderung turun. Komposisi terbesar pendapatan asli daerah berasal dari pendapatan asli daerah lain-lain yang sah dimana, biasanya berasal dari dana kapitasi atau pendapatan BLUD yang biasanya berasal dari institusi kesehatan misalnya Rumah Sakit dan pusat layanan kesehatan lainnya (Pamukti et al, 2022). Pembangunan infrastruktur di suatu daerah sangat mempengaruhi laju perekonomian daerah. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur.

Teori endogen merupakan pendekatan dalam ekonomi yang menekankan bahwa faktor internal dalam suatu sistem perekonomian, seperti inovasi, pendidikan, dan sumber daya manusia, berperan penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendapatan dari PAD dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan energi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah dapat meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan dari sumber pada penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas beberapa sumber yang dipaparkan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

**H1: Terdapat Pengaruh atas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

## **2. Hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut hasil penelitian (Oktavia and Zulvia, 2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Berpengaruh positifnya dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi ini menjelaskan bahwa dana perimbangan meningkat berarti pertumbuhan ekonomi juga meningkat pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2019-2021. Hasil ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang mana diteliti oleh Wididarma et al, (2021) bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah adalah tidak berpengaruh di mana penelitian ini memperlihatkan bahwa suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka akan menurunkan pula pertumbuhan ekonominya.

Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya terjadinya penambahan dana perimbangan menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut namun jika dana perimbangan mengalami penambahan kebutuhan maka pertumbuhan ekonomi akan menurun (Ningsih 2019).

Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karna dana perimbangan menciptakan keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi (Fauzan et al, 2018).

Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi artinya dana perimbangan sangat diperlukan dan dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur ekonomi yang akan menunjang kegiatan investasi swasta. Ketertarikan investor untuk menanamkan modal di daerah muncul karena tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila sebuah daerah ingin meningkatkan investasi swasta, maka dana perimbangan tumbuh secara positif (Santi et al. 2021). Pembangunan infrastruktur di suatu daerah sangat mempengaruhi laju perekonomian daerah. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur.

Dana perimbangan, yang mengalokasikan sumber daya pemerintah pusat ke daerah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti pertanian, pariwisata dan industri kreatif. Dukungan ini membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan peran dari faktor internal dan eksternal dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan dari sumber pada penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dari beberapa sumber yang dipaparkan menunjukkan bahwa Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti

dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

**H2: Terdapat Pengaruh atas Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**3. Hubungan antara Efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Efisiensi anggaran berarti tidak memboroskan anggaran untuk hal-hal yang tidak mempunyai manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip efisiensi dalam menghasilkan pendapatan yang diinginkan. Menghemat anggaran akan memberikan lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pembangunan infrastruktur ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan daerah yang efisien akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur daerah memberikan dampak besar terhadap laju perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh Pembangunan infrastruktur.

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan Langkah-langkah penghematan anggaran. Penghematan anggaran akan menciptakan dana sebagai hasil dari penghematan tersebut. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang mendesak. Hal ini juga ditegaskan oleh penelitian Nurulita et al, (2018) dan Putra, (2017)

yang menemukan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi pengelolaan keuangan, khususnya di lingkungan pemerintah, dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan prinsip-prinsip teori endogen. Pemerintah yang mengelola keuangan secara efisien akan lebih siap untuk menggunakan dana publik, dengan memprioritaskan investasi pada inovasi, pendidikan dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengalokasian dana yang tepat akan meningkatkan kemampuan ekonomi untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah dapat berdampak signifikan pertumbuhan ekonomi, karena pengelolaan yang baik memungkinkan penggunaan sumber daya yang terbatas secara lebih efektif, sehingga meningkatkan pengembangan faktor-faktor endogen yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan dari sumber pada penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

**H3: Terdapat pengaruh atas Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

#### **4. Hubungan antara SiLPA yang memediasi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

SILPA menurut Wahyu dan Dwirandra dalam Hairiyah et al, (2022) terjadi karena adanya surplus penerimaan daerah dalam neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dibanding komponen pengeluaran. SiLPA merupakan ukuran kapasitas pemerintah dalam mengalokasikan anggarannya. Semakin tinggi SiLPA di suatu daerah maka semakin besar pula pertumbuhan manusia di daerah tersebut, hal ini dikarenakan pemerintah harus mengalokasikan anggarannya untuk kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat difahami jika SiLPA terdapat pada anggaran daerah maka pembangunan manusia di daerah tersebut harusnya cukup baik. Sejalan dengan penjelasan tersebut, perlu diketahui bahwa jika suatu daerah memiliki SiLPA yang relatif besar dari tahun ke tahun, maka menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran tersebut, sehingga perlu adanya analisis lebih lanjut terkait pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah melalui SILPA.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam penelitian Putra, (2017) tidak berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi yang dimana semakin tinggi nilai SiLPA yang menganggur dalam rekening kas daerah maka akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur

selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014 nilai SiLPA terus mengalami peningkatan yang artinya masih banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan realisasi belanja pemerintahnya yang secara otomatis berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur di suatu daerah berdampak besar terhadap laju perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur.

PAD jika dikelola dengan baik dan efisien dapat menghasilkan SiLPA yang cukup besar. SiLPA kemudian dapat menjadi variabel mediasi antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah daerah berhasil mengelola PAD dengan baik dan menghasilkan SiLPA yang signifikan, maka pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam faktor-faktor endogen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti inovasi, infrastruktur, dan pendidikan.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengintegrasikan model penelitian dengan menjadikan SiLPA sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4: Terdapat Pengaruh atas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi SiLPA**



## **5. Hubungan antara SiLPA yang memediasi Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

DBH, DAU dan DAK, tiga unsur dana perimbangan (UU No. 23/2014). Dana ini didasarkan pada adanya kesenjangan potensi keuangan daerah yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Jumlah dana perimbangan akan berkurang seiring dengan meningkatnya penerimaan PAD. Dengan kata lain, semakin mandiri pemerintah daerah, maka ketergantungannya terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang.

Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah belum digunakan secara efektif dan efisien, dengan alokasi belanja modal yang masih rendah dibandingkan belanja daerah lainnya, sehingga pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Defisit anggaran mengharuskan penggunaan dana dari SiLPA, yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan daerah dan produktivitas perekonomian yang tentunya akan berpengaruh terhadap dana perimbangan (Fauzi, 2021). SiLPA menurut UU No. 27 tahun 2014 adalah selisih lebih pembiayaan netto dibandingkan dengan defisit anggaran dalam satu periode laporan realisasi anggaran. Defisit anggaran dapat ditutupi dari SiLPA, begitu juga dengan dana untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan dengan mengorbankan belanja langsung hingga tahun anggaran berakhir. Sebaiknya, nilai SiLPA dalam APBD

seharusnya nol yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah 100% atau maksimal.

Dana perimbangan yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan SiLPA yang besar bagi pemerintah daerah. SiLPA ini kemudian dapat digunakan kembali untuk berbagai kepentingan, termasuk berinvestasi dalam faktor-faktor endogen yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, SiLPA berfungsi sebagai mekanisme mediasi antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan, yang merupakan dana yang dialokasi oleh pemerintah pusat ke daerah, dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan beberapa cara yang konsisten dengan konsep teori pertumbuhan endogen.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengintegrasikan model penelitian dengan menjadikan SiLPA sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H5: Terdapat Pengaruh atas Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi SiLPA**

#### **6. Hubungan antara SiLPA yang memediasi Efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Bali dalam Rani, (2019) mengatakan bahwa adanya SiLPA diduga karena beberapa hal antara lain adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan anggaran dan realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih kecil dari pagu yang direncanakan. Selain itu

beberapa aspek yang diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya SiLPA adalah karena ada efisiensi atau penghematan belanja pemerintah karena program/kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga anggaran tidak terserap. Pembangunan infrastruktur suatu daerah memiliki dampak signifikan terhadap laju perekonomian daerah. Menurut teori pertumbuhan Endogen yang menyatakan akumulasi modal yang lebih besar merupakan salah satu sumber pertumbuhan.

Menurut Mauli dalam Rani, (2019) Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga tercipta sisa dana yang bersih, namun SiLPA seperti ini jarang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA yang muncul sebagai akibat dari kesalahan anggaran dan kekurangan dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, SiLPA harus dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana menganggur yang jika tidak digunakan dengan baik maka tidak akan menghasilkan dampak pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

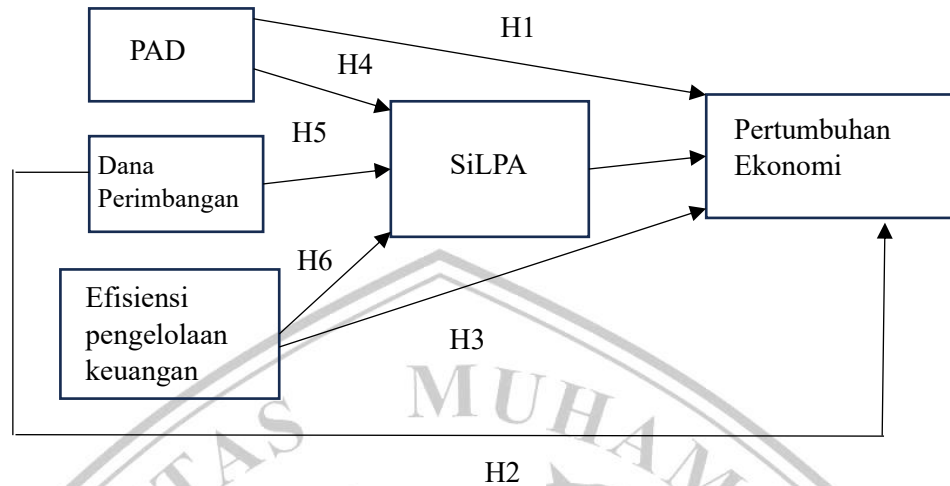
Efisiensi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik ke dalam faktor-faktor endogen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan,

penelitian, dan inovasi. Sebagai contoh, dana yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menghasilkan SiLPA yang cukup besar. SiLPA ini dapat digunakan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berinvestasi pada program-program sosial, kesehatan, dan kesejahteraan. Teori endogen dalam ilmu ekonomi menekankan pentingnya faktor-faktor internal dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti inovasi, pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengintegrasikan model penelitian dengan menjadikan SiLPA sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H6: Terdapat Pengaruh atas Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi SiLPA**

### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

**Keterangan:**

X1 : PAD

X2 : Dana Perimbangan

X3 : Efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Y : Pertumbuhan Ekonomi

Z : SiLPA